

## **ANALISIS PERBEDAAN PERATURAN DAFTAR NEGATIF INVESTASI DAN DAMPAKNYA PADA POLITIK HUKUM INVESTASI DI INDONESIA**

Sofha Salsabila <sup>1)</sup>, Tiurma Mangihut Pitta Allagan <sup>2)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia <sup>1,2)</sup>

Corresponding Author:

[sofhasalsabila@gmail.com](mailto:sofhasalsabila@gmail.com) <sup>1)</sup>, [tiurma@ui.ac.id](mailto:tiurma@ui.ac.id) <sup>2)</sup>

### **Abstrak**

Peraturan Daftar Negatif Investasi (DNI) memiliki peran penting dalam mengatur investasi asing maupun dalam negeri di Indonesia. Tulisan ini akan mengulas perubahan penting yang telah terjadi dalam DNI seiring berjalannya waktu dan dampak yang timbul dari perubahan-perubahan tersebut terhadap kerangka kebijakan investasi Indonesia. Penelitian ini melakukan analisis mendalam terhadap perbedaan dalam peraturan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang diterapkan dalam berbagai periode di Indonesia dan dampaknya pada politik hukum investasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative dengan melibatkan analisis dokumen peraturan DNI, kebijakan investasi, serta literatur terkait lainnya. Hasil analisis mengungkapkan bahwa perubahan dalam peraturan DNI mencerminkan pergeseran dalam pandangan politik hukum investasi Indonesia, dari yang lebih restriktif menjadi lebih terbuka terhadap investasi.

**Kata Kunci:** investasi, daftar negatif, hukum investasi

### **Abstract**

*The Investment Negative List (DNI) regulations are a vital instrument in regulating foreign and domestic investments in Indonesia. This article discusses the significant changes that have occurred in the DNI regulations over time and how these changes have influenced the framework of Indonesia's investment policies. This research conducts an in-depth analysis of the differences in the Investment Negative List (DNI) regulations applied in various periods in Indonesia and their impact on investment law and policy. The research methodology will use normative juridical research that involves the analysis of DNI regulation documents, investment policies, and relevant literature. The results of the analysis reveal that changes in the DNI regulations reflect a shift in Indonesia's investment law and policy perspective, moving from a more restrictive approach to a more open stance towards investment.*

**Keywords:** investment, negative List, investment Law

## **PENDAHULUAN**

Secara umum, pembangunan ekonomi menjadi fokus utama bagi negara-negara yang sedang berkembang. Alasannya adalah karena sektor ekonomi memiliki peran penting dalam mendorong pencapaian tujuan dan inovasi di berbagai aspek kehidupan

### **History:**

Received : 25 Juni 2023

Revised : 10 Oktober 2023

Accepted: 25 Desember 2023

Published: 26 Desember 2023

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



masyarakat. Peningkatan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang tinggi merupakan faktor utama yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk mencapai kesejahteraan tersebut, diperlukan modal yang cukup besar. Hanya mengandalkan dana dari pemerintah saja tidak cukup, sehingga perlu mencari sumber dana lain. Dalam hal ini, investasi menjadi salah satu elemen kunci dalam pengembangan ekonomi suatu negara.

Penanaman modal sebagai langkah awal untuk melakukan pembangunan merupakan salah satu sumber modal yang dapat diperoleh di samping sumber dana dari pemerintah (Dewi, 2016). Hal ini karena penanaman modal dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing industri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan negara, penanaman modal dapat dilakukan oleh investor domestik dan asing. Investor domestik dapat menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi suatu negara, sedangkan investor asing dapat membantu meningkatkan investasi dan memperluas pasar bagi industri domestik.

Di Indonesia, kebijakan investasi memiliki peran krusial dalam menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Investasi yang memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi adalah investasi yang berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi, sosial, dan aspek lainnya. Pemerintah mengelola investasi ini karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945: "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.*" Untuk mengatur investasi tersebut Indonesia telah mengimplementasikan peraturan-peraturan yang mengikat, termasuk Peraturan Daftar Negatif Investasi (DNI)(Al Azis, 2023).

Melalui politik hukum, negara membuat suatu rancangan dan rencana pembangunan hukum nasional di Indonesia. DNI adalah salah satu produk politik hukum yang mengatur bidang-bidang yang terbuka atau terbatas bagi investor asing dan domestic (Harjono, 2021). Hal ini merupakan bagian integral dalam politik hukum investasi Indonesia, yang menentukan arah dan strategi negara dalam menghadapi tantangan global dalam bidang investasi. Perubahan dalam DNI seiring waktu mempengaruhi kebijakan investasi dan mencerminkan pergeseran dalam pandangan politik hukum investasi di Indonesia(Munawar M. et al., 2021).

Pada dasawarsa terakhir, Indonesia telah menyaksikan perubahan signifikan dalam peraturan DNI yang mencerminkan transformasi dalam kebijakan investasi negara ini. Perubahan ini meliputi liberalisasi sektor-sektor tertentu, insentif pajak, dan berbagai upaya untuk meningkatkan iklim investasi. Namun dalam konteks yang lebih luas, perubahan DNI juga berdampak signifikan terhadap kebijakan politik hukum investasi di Indonesia. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, kami akan menganalisis terhadap perbedaan dalam peraturan DNI yang diterapkan dalam berbagai periode di Indonesia

dan bagaimana perubahan ini memengaruhi politik hukum investasi (Indriani R. & Mariana M, 2021).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana perubahan dalam peraturan DNI telah mempengaruhi pandangan politik hukum investasi Indonesia, serta dampaknya terhadap investasi dalam negeri dan asing. Hasil analisis ini akan memberikan wawasan penting bagi para pengambil kebijakan, pihak bisnis, dan peneliti yang tertarik dalam perkembangan investasi di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan membahas implikasi sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan perubahan dalam peraturan DNI. Dengan demikian, penelitian ini akan menjelaskan secara komprehensif tentang peraturan Daftar Negatif Investasi (DNI) dan bagaimana perubahan dalam DNI memengaruhi politik hukum investasi di Indonesia (Sulistiyowati S. & Paripurna P, 2014).

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menajwab isu hukum yang dihadapi (Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2013). Pendekatan ini dirancang untuk memahami perubahan dalam peraturan DNI dari sudut pandang hukum investasi dan kebijakan.

1. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai versi peraturan Daftar Negatif Investasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia selama berbagai periode waktu. Ini mencakup peraturan-peraturan DNI yang berlaku saat ini dan yang telah dicabut atau direvisi sepanjang sejarah. Data-data ini berperan sebagai sumber utama untuk mengidentifikasi perubahan dalam peraturan DNI.
2. Selain dokumen DNI, penelitian ini juga melibatkan analisis kebijakan investasi yang meliputi berbagai perubahan dan pergeseran dalam pandangan politik hukum investasi Indonesia. Data ini diperoleh melalui berbagai laporan pemerintah, dan kebijakan investasi yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga terkait.
3. Untuk mendukung analisis, penelitian ini juga mengacu pada literatur terkait seperti jurnal akademik, buku, dan makalah penelitian terdahulu yang membahas topik peraturan DNI dan politik hukum investasi di Indonesia. Literatur ini memberikan pandangan teoritis dan kerangka kerja konseptual yang penting dalam menganalisis dampak perubahan dalam peraturan DNI.
4. Data yang dihimpun dari berbagai sumber di atas akan dianalisis secara kualitatif. Perubahan-perubahan dalam peraturan DNI akan diidentifikasi dan dijelaskan dalam konteks perubahan kebijakan investasi yang lebih luas di Indonesia. Analisis ini akan memberikan pemahaman tentang perubahan kebijakan yang

berkaitan dengan sektor-sektor tertentu, insentif pajak, dan langkah-langkah lainnya yang diambil oleh pemerintah dalam mendukung investasi.

Metodologi ini akan memungkinkan kami untuk memahami dampak perbedaan dalam peraturan DNI terhadap politik hukum investasi di Indonesia secara komprehensif. Selain itu, penggunaan berbagai sumber data akan memastikan validitas dan keandalan temuan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini mengungkapkan perubahan yang signifikan dalam peraturan Daftar Negatif Investasi (DNI) di Indonesia selama beberapa dekade terakhir. Sejak awal tahun 2000-an, terjadi pergeseran yang nyata dalam pandangan politik hukum investasi di negara ini. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal adalah salah satu aturan yang dikeluarkan oleh negara dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor, baik domestic maupun asing untuk berinvestasi dalam berbagai bidang ekonomi tersebut. Salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal itu sendiri adalah Daftar Negatif Investasi (DNI). DNI merupakan daftar yang dikeluarkan dalam sebuah peraturan yang memiliki isi yaitu daftar bidang yang dibatasi atau tertutup bagi investor asing atau diberikan batasan-batasan tertentu. Daftar ini dirancang untuk mengatur investasi asing dengan kebijakan ekonomi dan keamanan nasional. Seyogianya semua kebijakan dan pengaturan ekonomi harus tidak terlepas dari upaya mewujudkan kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat konsitusi/ realism ekonomi dan konstitusionalisme (Saut P. Panjaitan, 2010).

Analisis kami menunjukkan bahwa sektor-sektor tertentu, yang sebelumnya terbatas bagi investor asing, telah menjadi lebih terbuka. Pada awalnya, DNI memiliki daftar sektor yang cukup panjang yang memiliki batasan bagi investor asing, namun seiring berjalannya waktu, daftar ini telah dikecilkan, menghasilkan perubahan yang signifikan dalam politik hukum investasi.

Perubahan dalam DNI ini telah membawa dampak yang nyata pada investasi di Indonesia. Terdapat peningkatan yang signifikan dalam arus modal asing ke bidang-bidang yang sebelumnya terbatas. Misalnya, sektor teknologi dan infrastruktur telah mengalami pertumbuhan yang pesat sejak perubahan peraturan DNI. Seiring dengan perubahan ini, pemerintah juga telah memberlakukan insentif pajak yang lebih menguntungkan bagi investor asing untuk meningkatkan investasi dalam sektor-sektor tersebut (Sukananda S & Mudiparwanto W.A, 2020).

Namun, penting untuk dicatat bahwa perubahan dalam DNI juga telah menimbulkan beberapa tantangan. Pertumbuhan cepat dalam beberapa sektor tertentu dapat menciptakan kesenjangan ekonomi di negara ini, dan pemerintah perlu memastikan bahwa manfaat dari investasi ini merata ke seluruh masyarakat. Selain itu,

perubahan dalam DNI juga memicu kompetisi global yang lebih sengit, yang menuntut agar regulasi dan kebijakan investasi Indonesia terus diperbarui dan diperbaiki.

Pemahaman tentang perbedaan dalam peraturan DNI dan dampaknya pada politik hukum investasi Indonesia menjadi penting dalam mengarahkan kebijakan investasi di masa depan. Rekomendasi dapat diajukan untuk memastikan keberlanjutan dan kesetaraan dalam pertumbuhan ekonomi, sambil tetap memperhatikan kompetisi global yang semakin ketat.

Perubahan yang terjadi dalam peraturan DNI di Indonesia mencerminkan transformasi yang mendalam dalam politik hukum investasi negara ini. Sejak awal tahun 2000-an, kita telah menyaksikan pergeseran signifikan dari pendekatan yang lebih restriktif terhadap investasi asing menuju kebijakan yang lebih terbuka terhadap investor asing. Perubahan dalam DNI mencakup revisi besar-besaran terhadap daftar sektor-sektor yang sebelumnya terbatas bagi investor asing, yang secara signifikan memengaruhi cara Indonesia mendekati investasi (Pambudhi H. D. & Ramadayanti E, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dalam DNI telah memiliki dampak positif yang nyata pada investasi di Indonesia. Peningkatan arus modal asing ke sektor-sektor yang sebelumnya terbatas, seperti teknologi dan infrastruktur, telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Sektor teknologi, sebagai contoh, telah menjadi motor pertumbuhan ekonomi digital di negara ini, dengan banyak perusahaan teknologi asing yang berinvestasi dalam startup lokal. Ini menciptakan lapangan kerja baru dan berkontribusi pada inovasi teknologi di dalam negeri.

Namun, perubahan dalam DNI juga telah memunculkan sejumlah tantangan yang harus diatasi. Pertumbuhan yang cepat dalam beberapa sektor tertentu dapat menciptakan ketimpangan ekonomi jika tidak dikelola dengan baik. Pemerintah harus memastikan bahwa manfaat dari investasi ini merata ke seluruh masyarakat, termasuk dengan memastikan peluang yang adil bagi pelaku usaha lokal. Selain itu, persaingan global yang semakin ketat menuntut agar regulasi dan kebijakan investasi Indonesia terus diperbarui dan diperbaiki untuk menjaga daya tariknya sebagai tujuan investasi yang menjanjikan.

## **SIMPULAN**

Dalam kesimpulan, penelitian ini menggambarkan perubahan dalam peraturan Daftar Negatif Investasi (DNI) di Indonesia dan dampaknya pada politik hukum investasi di negara ini. Beberapa temuan kunci yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Perubahan dalam DNI: Penelitian ini telah mengidentifikasi perbedaan yang signifikan dalam DNI dari berbagai periode di Indonesia. Perubahan ini mencakup peningkatan liberalisasi dalam sektor-sektor tertentu yang sebelumnya terbatas bagi investor asing.

- 2) Pengaruh pada Investasi: Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dalam DNI telah memberikan dampak positif pada investasi di Indonesia. Peningkatan arus modal asing, terutama dalam sektor teknologi dan infrastruktur, menjadi salah satu hasil dari perubahan kebijakan ini.
- 3) Tantangan yang diakibatkan: Namun, perubahan dalam DNI juga memunculkan sejumlah tantangan. Pertumbuhan cepat dalam beberapa sektor dapat menciptakan ketimpangan ekonomi, dan pemerintah harus memastikan manfaat dari investasi ini merata ke seluruh masyarakat. Selain itu, persaingan global yang semakin ketat mengharuskan Indonesia untuk terus memperbarui dan memperbaiki regulasi dan kebijakan investasi.

Dalam konteks ini, pemahaman tentang perbedaan dalam peraturan DNI dan dampaknya pada politik hukum investasi Indonesia adalah penting untuk mengarahkan kebijakan investasi di masa depan. Dalam hal ini, rekomendasi yang dapat diajukan melibatkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan keadilan sosial, serta meningkatkan daya saing global Indonesia dalam iklim investasi yang terus berubah.

Kesimpulan ini menegaskan bahwa perubahan dalam peraturan DNI adalah bagian integral dari perkembangan politik hukum investasi di Indonesia, dan pemahaman yang baik tentang dinamika ini dapat membantu negara ini untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosialnya dengan lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Azis, M. I. (2023). Politik Kebijakan Ekonomi Investasi Asing Pada Pariwisata Berbasis Desa Adat. *Al Kamal*, 3(1), 97–106.
- Dewi, T. M. (2016). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, BI rate, dan inflasi terhadap investasi asing langsung di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 4(3).
- Harjono, D. K. (2021). *Bahan Ajar Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. UKI Press.
- Indriani R, & Mariana M. (2021). Reaksi Pasar Modal Indonesia Terhadap Peristiwa Pengesahan Uu Cipta Kerja 2020 (Studi Kasus Perusahaan Yang Terdaftar Pada Lq45. *Jurnal Bina Akuntansi*, 8(2), 167–186.
- Munawar M, Marzuki M, & Affan I. (2021). Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perpspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 3(2), 452–468.
- Pambudhi H. D., & Ramadayanti E. (2021). Menilai Kembali Politik Hukum Perlindungan Lingkungan Dalam Uu Cipta Kerja Untuk Mendukung Keberlanjutan Ekologis. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(2), 297–332.

Sofha Salsabila <sup>1)</sup>, Tiurma Mangihut Pitta Allagan <sup>2)</sup>, **Analisis Perbedaan Peraturan Daftar Negatif Investasi Dan Dampaknya Pada Politik Hukum Investasi Di Indonesia**

- Saut P. Panjaitan. (2010). Politik Pembangunan Hukum di Bidang Investasi Suatu Keniscayaan Konstitusi Ekonomi. *Jurnal Konstitusi*, 7(2), 48–65.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamuji. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sukananda S, & Mudiparwanto W.A. (2020). Analisis Pengaturan Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture di Indonesia. *Diversi: Jurnal Hukum*, 5(2), 210–236.
- Sulistyowati S, & Paripurna P. (2014). Mempertahankan Tujuan Peraturan Daftar Negatif Investasi Dalam Mengendalikan Dominasi Kepemilikan Asing (Studi Kasus Pada Industri Telekomunikasi). *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 200–215.